SKRIPSI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN *OPERATION SOVEREIGN BORDERS* AUSTRALIA PADA MASA PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI ANTHONY ALBANESE DALAM MENANGGULANGI PENGUNGSI

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Perbatasan

Oleh :

Gusti Alvi Ridho Fadhel

NIM. E1112201004

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN KEBIJAKAN *OPERATION SOVEREIGN BORDERS* AUSTRALIA PADA MASA PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI ANTHONY ALBANESE DALAM MENANGGULANGI PENGUNGSI

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan

Oleh :
Gusti Alvi Ridho Fadhel
NIM. E1112201004

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN KEBIJAKAN *OPERATION SOVEREIGN BORDERS* AUSTRALIA PADA MASA PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI ANTHONY ALBANESE DALAM MENANGGULANGI PENGUNGSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Gusti Alvi Ridho Fadhel
NIM. E1112201004

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ully Nuzulian, S.IP, M.Si
NIP. 198007302003122002

Pada Tanggal : 9 / Desember 2024.

Dosen Pembimbing Pendamping

Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP, M.A
NIDN. 0028119007

Pada Tanggal : 17 / Januari 2025

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN *OPERATION SOVEREIGN BORDERS* AUSTRALIA PADA MASA PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI ANTHONY ALBANESE DALAM MENANGGULANGI PENGUNGSI

Oleh :
Gusti Alvi Ridho Fadhel
NIM. E1112201004

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Rabu / 7 Mei 2025
Waktu : 15.00 – 17.00
Tempat : Ruang 1

Tim Penguji :

Ketua	Sekretaris
Ully Nuzulian, S.IP, M.Si	Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP, M.
NIP. 198007302003122002	NIDN. 0028119007

Dosen Penguji Utama	Dosen Penguji Pendamping
Dr. Ira Patriani., M.Si	Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si
NIP. 197611302003122001	NIP. 196911222002121002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini memuat mengenai pelaksanaan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) dalam mengatasi permasalahan pengungsi yang masuk ke Australia. *Operation Sovereign Borders* merupakan kebijakan yang di gagas oleh Tonny Abbot tepatnya pada tahun 2013. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Australia saat ini yaitu Anthony Albanese, justru membuka kuota pengungsi sebagai respons terhadap kekurangan tenaga kerja dan kebutuhan akan imigrasi yang lebih inklusif. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan *Operation Sovereign Borders* dalam menjalankan proses kebijakan pada masa pemerintahan Anthony Albanese. Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif yang didukung dengan metode kualitatif. Penulis menggunakan teori *Rational Choice* dari Walt yang mengacu pada 3 prinsip utama yaitu *Product of Choices Made by Unitary Actors*, *Preference* dan *Subjective Expected Utility* yang didukung dengan konsep politik luar negeri. Pemerintah Australia merupakan unit analisis utama dalam penelitian ini dan pengungsi adalah sebagai unit eksplanasi. Sesuai dengan pernyataan Anthony Albanese "kuat dalam hal perbatasan namun tidak lemah dalam hal kemanusiaan" artinya pelaksanaan kebijakan *Operation Sovereign Borders* yang diterapkan oleh Anthony Albanese lebih humanis (manusiawi), walaupun disisi lain penerapan kebijakan itu bertentangan dengan tujuan *Operation Sovereign Borders* yang dijalankan sebelumnya.

Kata kunci : Kebijakan *Operation Sovereign Borders*, Anthony Albanese, Pengungsi.

ABSTRACT

This research explores the implementation of Operation Sovereign Borders (OSB) in overcoming refugees entering Australia. The OBS is a policy initiated by Tonny Abbot in 2013. However, the current Australian Prime Minister, Anthony Albanese, has instead opened up refugee quotas in response to labor shortages and the need for more inclusive immigration. Therefore, this research focuses on the implementation of Operation Sovereign Borders (OSB) in implementing the policy during Anthony Albanese's period. The research employed an explanatory research design supported by a qualitative method. It was underpinned by a theory of Rational Choice expressed by Walt. The theory refers to three main principles: Product of choice made by unitary actors, Preference, and Subjective Expected Utility, supported by the foreign political concept. The Australian Government was placed as the main unit of analysis in this research, with the refugees serving as the explanatory unit. Reflecting Anthony Albanese's statement, "strong on borders but not weak on humanity," the current implementation of Operation Sovereign Borders under his leadership takes a more humane approach. Nevertheless, this stands in contrast to the original objectives of the policy as it was previously carried out.

Keywords: Operation Sovereign Borders Policy, Anthony Albanese, Refugees.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese dalam Menanggulangi Pengungsi". Pemilihan judul ini dikarenakan adanya perubahan pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan tingginya tingkat pengungsi yang memasuki wilayah negara Australia. Australia merupakan negara yang menjadi surga bagi para pengungsi, dikarenakan Australia adalah salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Dalam perjanjian tersebut Australia berupaya untuk memberikan perlindungan internasional kepada para pencari suaka untuk berimigrasi ke negarannya. Faktor lainnya yang menjadi pendukung banyaknya para pengungsi menuju ke negara Australia adalah karena kehidupan multietnik di negara tersebut.

Pada tahun 2013 pemerintah Australia Tonny Abbott mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat tegas serta unilateral. Kebijakan tersebut menuai banyak kontroversi dari berbagai macam pihak, dikarenakan tidak sesuai atau sejalan dengan peranan Australia sebagai negara penandatanggan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Kebijakan *Operation Sovereign Borders* merupakan suatu pilihan yang dinilai sebagai suatu langkah yang tegas dan keras untuk menghentikan arus masuknya pengungsi dan pencari suaka. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan tingginya jumlah pengungsi atau pencari suaka yang memasuki wilayah Australia.

Dalam pernyataannya Anthony Albanese mengatakan bahwa dirinya "kuat dalam hal perbatasan namun tidak lemah dalam hal kemanusiaan" melalui

pemerintah Partai Buruh akan mengubah kebijakan nasional pencari suaka dengan menghapus apa yang disebut visa perlindungan sementara. Berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini, para pengungsi yang diterima secara resmi oleh Australia akan dimukimkan kembali secara permanen. Tetapi mereka yang tiba dengan kapal diberi visa perlindungan tiga tahun. Visa dapat diperpanjang jika pengungsi tidak dapat dikembalikan ke tanah air mereka.

Adapun rumusan masalah penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang "Mengapa Pelaksanaan Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia menjadi terbuka terhadap pengungsi pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese?". Menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan *Operation Sovereign Borders* yang dijalankan oleh pemerintah Australia dibawah kepemimpinan Anthony Albanese, pilihan apa saja yang dimiliki pemerintah Australia, serta apa yang diharapkan pemerintah Australia dalam kebijakan tersebut.

Dalam segi manfaat teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi studi hubungan internasional sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan penelitian mengenai kebijakan *Operation Sovereign Borders*. Sedangkan dalam segi manfaat praktis, dapat menjadi suatu bentuk perspektif bagi pembaca mengenai kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh Australia untuk menjaga kedaulatan negarannya dari ancaman masuknya gelombang pengungsi yang besar. Selain itu, penelitian ini berguna dalam memberikan saran kepada pemerintah dan

pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk tidak hanya berpegang teguh pada kedaulatan negara sendiri ataupun adanya unsur kepentingan individu.

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif yang didukung dengan metode kualitatif. Penulis menggunakan teori *Rational Choice* dari Walt yang mengacu pada 3 prinsip utama yaitu *Product of Choices Made by Unitary Actors, Preference* dan *Subjective Expected Utility* yang didukung dengan konsep politik luar negeri. Pada penelitian ini menghasilkan 3 kesimpulan yang dilihat dari teori pilihan rasional, yaitu *Product of Choices Made by Unitary Actors* menjelaskan bahwa aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan *Operation Sovereign Borders* yaitu pemerintah sebelumnya yaitu Tony Abbot yang menetapkan kebijakan dan pemerintah sekarang yaitu Anthony Albanese memiliki perbedaan pelaksanaan dalam menjalan kebijakan *Operation Sovereign Borders*. Namun, Seiring dengan terpilihnya Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri Australia, akan menerapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders* dengan membuka kelonggaran bagi para pengungsi dengan lebih mengutamakan manusiawi (humanis) hal ini sesuai dengan pernyataan dirinya "kuat dalam hal perbatasan namun tidak lemah dalam hal kemanusiaan" artinya pelaksanaan kebijakan *Operation Sovereign Borders* yang diterapkan oleh Anthony Albanese lebih humanis (manusiawi). Dalam prinsip yang kedua *Preference* yang mengacu pada pilihan alternatif dan penguat dari pembuat kebijakan untuk menanggulangi permasalahannya, pemerintahan Australia dibawah pimpinan Anthony Albanese

memiliki pilihan untuk kembali melanjutkan kebijakan *Pacific Solution* yang diresmikan oleh John Howard, atau melanjutkan kebijakan Kevin Rudd yang berupaya untuk menutup pulau-pulau yang menjadi pusat detensi dan memberikan seluruh pencari suaka yang telah mendapatkan *temporary protection visas*, menjadi *permanent protection visas*. Selanjutnya *Subjective Expected Utility* adalah tentang peranan dari pengambil kebijakan yang memberikan keuntungan paling tinggi. Kebijakan *Operation Sovereign Borders* merupakan kebijakan yang dianggap paling menguntungkan bagi terciptanya kepentingan negara Australia, yaitu dalam mempertahankan kedaulatan negaranya melalui keamanan perbatasannya.

Adapun saran penelitian ini penulis berharap adanya peninjauan kebijakan dengan mengevaluasi kebijakan secara menyeluruh terhadap kebijakan *Operation Sovereign Borders* untuk menilai dampaknya terhadap pengungsi dan masyarakat. Selain itu, penulis berharap aktor yang terlibat dapat membangun kemitraan dengan negara lain yaitu bekerjasama dengan negara-negara lain dalam kawasan untuk membagi tanggung jawab dalam menangani arus pengungsi, sehingga Australia tidak merasa terbebani sendirian dalam masalah ini. Keempat, penulis berharap Pemerintah Australia dapat mengkampanyekan kesadaran public sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kemanusiaan terkait pengungsi, termasuk cerita individu yang terpaksa melarikan diri dari negara asal mereka. Ini dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan yang lebih inklusif.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Gusti Alvi Ridho Fadhel
Nomor Mahasiswa	:	E1112201004
Program Studi	:	Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Gusti Alvi Ridho Fadhel

NIM. E1112201004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

That is something i've learned in my life, when a door closes another one is open. Success may come by luck, but it's not something to rely on because whenever success and luck is defeated by underestimation and determination it wont means a thing. So set your goals, find your trigger, act your thought and score it.

Persembahan:

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas karunia-Nya dan Kekuasaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebaik-baiknya pertolongan hanyalah memohon kepada-Mu. Serta berbagai pihak yang tulus membantu proses penulisan ini dari awal hingga akhir, terutama Dosen pembimbing utama Ibu Ully Nuzulian, S.IP, M.Si yang memberikan bimbingan dan masukan dengan penuh kesabaran. Serta Dosen pembimbing kedua Bapak Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP, M.A yang turut serta memberikan bimbingan dan motivasi dengan penuh perhatian. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Gusti Muhammad Fadli, S.Sos., M.Si dan Lisnawati atas limpahan kasih sayang yang tidak pernah memudar turut menemani kehidupan penulis, doa-doa dan dukungan yang selalu kalian panjatkan menjadi bekal yang sangat berarti. Terima kasih telah hadir sebagai orang tua yang selalu mendukung penuh kepada anak-anaknya.

2. Gusti Alvi Ridho Fadhel, Terima kasih sudah bertahan hingga saat ini. Berbagai cobaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini menjadikan motivasi untuk terus berjuang. Saya percaya bahwa saya selalu bisa berproses untuk menemukan jalan masa depan yang semakin cerah.
3. Saudara kandung, Kakak Mas Sufefty Febby Chairani dan Adik Gusti Fatih Nurfadhil. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang, serta dukungan dan motivasi kalian selama ini. Semoga kalian selalu sehat dan menjadi orang yang lebih sukses kedepannya.
4. Dosen-dosen Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura, Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan Bapak/Ibu selama kuliah, ilmu-ilmu tersebut akan tersimpan dengan baik di dalam buku catatan penulis dan di ingatan "semoga Allah SWT membalas amal kebaikan Bapak & Ibu dengan balasan yang berlipat-lipat".
5. Teman-teman Hubungan Internasional PPAPK 2020 yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman, semoga kalian selalu sehat dan sukses di masa depan.
6. Amar Tri Wijaya, yang telah membantu proses pengerjaan skripsi. Terima kasih atas bantuannya yang selalu ingin saya repotkan untuk mem-parafrase penulisan skripsi ini. Semoga kamu akan selalu dipermudahkan untuk mengerjakan skripsi dan dapat menggapai cita-cita dalam keadaan sehat dan bahagia.

7. Muhammad Belvin Andre dan Aria Pranadipa Rusell, orang yang tiada henti mendukung dan memberikan motivasi dalam proses penulisan Skripsi. Walaupun tidak sepenuhnya membantu, but you are all my best support system. Sehat dan sukses selalu my brooo!.
8. Ahmad Dava Fachriandi Akbar, my brother another mother.Terima Kasih atas dukungan dan motivasi pencerahan selama ini. Sehat dan sukses selalu kedepannya, dan tetap menjadi my non-blood brother ever.
9. Dandi Ramadani, terima kasih atas bantuannya yang selalu memberikan masukan dan bertukar cerita keluh kesah sebagai mahasiswa akhir. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses.
10. Korbeca Aura Isabella, terima kasih atas kehadirannya selama ini. Serta Putri Dewi Sutradharma, terima kasih karena selalu ada di samping saya dalam keadaan suka dan duka. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya selama ini. Semoga kita selalu bersama dan bisa menggapai cita-cita dan harapan yang kita inginkan untuk kedepannya.
11. Dayang Elsa Indriani, Terima kasih telah menjadi teman yang baik dan selalu ingin mendengar cerita keluh kesah selama proses pengerjaan Skripsi. semoga kamu selalu sehat dan bahagia untuk menjadi orang yang sukses di masa depan.
12. Putri Ergina Alsyafia dan Zidni Adri, terima kasih selalu mau mendengar cerita dan keluh kesah penulis dalam pengerjaan skripsi. Semoga kalian selalu sehat dan dipermudahkan serta dilancarkan dalam proses penulisan skripsi.

13. Imam Ambara Ashari Ritonga, terima kasih telah menjadi teman yang baik dan selalu memotivasi untuk menulis skripsi. Terima kasih atas waktunya menjadi orang yang selalu gas ketika diajak pergi. Semoga selalu sehat dan sukses untuk masa depannya.
14. Kopi Malam, Kucai Mehong, Basecamp, dan Keluarga Fisang, yang telah menjadi sobat grup online selama ini. Terima kasih atas semangat dan dukungannya kepada penulis untuk mengerjakan skripsi dengan cepat.
15. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat danhidayah-Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul: **"Pelaksanaan Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese Dalam Menanggulangi Pengungsi",** ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai syarat sidang.

Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan dari skripsi ini. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura dan sekaligus menjadi Dosen Pembahas Utama.
3. Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku Ketua Pengelola Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (PPAPK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

4. Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura dan sekaligus menjadi Dosen Pembahas Pendamping.
5. Dr. Elyta, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan.
6. Ully Nuzulian, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, membimbing dan memotivasi selama proses bimbingan penulisan proposal penelitian.
7. Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP, M.A selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam proses penulisan proposal penelitian.
8. Seluruh Dosen Hubungan Internasional, Pihak PembantuDekan, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak mmeberikan dukungan selama masa perkuliahan dan penulisan proposal penelitian.

Pontianak, 25 Januari 2025



Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **x**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR GRAFIK ..... **xx**
DAFTAR BAGAN ..... **xxi**
DAFTAR TABEL ..... **xxii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 12
1.3. Fokus Penelitian 12
1.4. Rumusan Masalah 13
1.5. Tujuan Penelitian 13
1.6. Manfaat Penelitian 13
1.6.1. Manfaat Teoritis 13
1.6.2. Manfaat Praktis 14
BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**
2.1. Definisi Konsep 15
2.1.1. Politik Luar Negeri 16
2.2. Teori 17
2.2.1. Teori *Rational Choice* 17
2.3. Hasil Penelitian yang Relevan 21
2.4. Alur Pikir Penelitian 30
2.5. Pertanyaan Penelitian 32
BAB III METODE PENELITIAN **33**
3.1. Jenis Penelitian 33
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 36
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 38
3.3.1. Lokasi Penelitian 38
3.3.2. Waktu Penelitian 38
3.4. Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 39
3.4.1. Unit Analisa 39
3.4.2. Unit Eksplanasi 39
3.5. Teknik Pengumpulan Data 40
3.5.1. Studi Kepustakaan 40
3.5.2. Dokumentasi 40
3.6. Instrumen dan Alat Pengumpulan Data 41

3.7. Analisa Data 42
3.7.1. Keabsahan Data..... 42
3.7.2. Teknik Analisa Data..... 44
BAB IV GAMBARAN UMUM..... 47
4.1. Profil Negara..... 47
4.2. Kondisi Geografi dan Demografi Negara Australia..... 49
4.3. Konstitusi Negara Australia..... 51
4.4. Sistem Pemerintahan Negara Australia..... 53
4.5. Pertahanan Perbatasan Maritim Australia..... 57
4.6. Kebijakan Australia dalam Menanggulangi Pengungsi pada masa Pemerintahan Anthony Albanese..... 58
BAB V PEMBAHASAN..... 61
5.1. Pelaksanakaan Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia Pada Masa Pemerintahan Anthony Albanese..... 61
5.1.1. *Product of Choices made by Unitary Actors*..... 61
5.1.2. *Preference*..... 76
5.1.3. *Subjective Expected Utility*..... 88
BAB VI PENUTUP..... 101
6.1. Kesimpulan..... 101
6.2. Saran..... 103
DAFTAR PUSTAKA..... 107
LAMPIRAN..... 117

DAFTAR GRAFIK

Grafik *halaman*
1.1. Kasus Pengungsi di Australia dari Tahun 2015-2023.....5
1.2. Kasus Pengungsi berdasarkan Masa Pemerintahan PM Australia.....6

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*
2.1. Kerangka Pikir 30

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

2.1 Penelitian Relevan.....26

3.1 Waktu Penelitian.....38

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

3.1 Analisis Interaktif 45
4.1 Bendera dan Peta Negara Australia 47
4.2 Struktur Pemerintahan Australia 55
4.3 Poster Perbatasan Maritim Australia 57
5.1 Satuan Tugas Gabungan Badan Kebijakan OSB Australia 66
5.2 Pernyataan Dukungan Anthony Albanese terhadap Kebijaka Koalisi 74
5.3 Poster Promosi Kebijakan OSB 79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada abad ke-19, Australia sudah menjadi salah satu negara tujuan utama bagi para pengungsi. Perbatasan Australia melalui jalur laut seperti pulau Manus, Nauru dan Papua Nugini menjadi wilayah yang sangat kontroversial. Letak geografis negara yang strategis dan memiliki kemajuan negara serta jaminan hidup yang tinggi, menjadikan alasan utama bagi pengungsi untuk menuju Australia. Faktor internal seperti kondisi ekonomi negara asal para imigran dan alasan eksternal seperti keamanan negara serta kepentingan nasional Australia mempengaruhi jumlah pengungsi yang datang ke Australia (Mochamad, 2021). Banyak dari mereka meninggalkan negaranya karena krisis ekonomi, dan ingin mendapatkan kesejahteraan di negara baru. Selain itu, imigran juga banyak yang merupakan korban dari peperangan di negaranya.

Pengungsi merupakan persoalan yang akan selalu ada dalam peradaban manusia. Sebagai manusia, mempunyai naluri untuk selalu mencari kenyamanan dalam hidupnya dan menghindar dari adanya rasa takut. Rasa takut yang dialami manusia merupakan ancaman yang dapat ditimbulkan oleh faktor alam maupun faktor perbuatan manusia lainnya. Ancaman dalam kategori faktor alam adalah bencana alam, sedangkan yang termasuk perbuatan manusia adalah seperti perang, kerusuhan dan sebagainya (Achmad, 2003). Pada dasarnya pengungsi juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama seperti warga negara di negara tujuan.

Para pengungsi adalah orang-orang yang datang sebagai imigran tetapi dengan maksud untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan terpaksa meninggalkan negaranya karena terancam sehingga ingin mendapatkan tempat yang lebih aman di negara lain. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Konvensi Jenewa 1951 mengenai *Convention Relating to the Status of Refugee* menyebutkan bahwa pengungsi yang mengungsi ke negeri lain karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik, maupun kelompok kepentingan lainnya (Guy S, 2011). Dalam penanganannya, sudah seharusnya jika Australia memberikan perlindungan dan bantuan yang lebih efektif untuk menangani masalah pengungsi.

Australia memiliki hukum yang mengatur tentang pengungsi, termasuk Konvensi Pengungsi tahun 1951, yang membuatnya wajib mengurus para pengungsi yang datang ke wilayahnya. Peraturan undang-undang tentang pengungsi di Australia terdiri dari undang-undang Imigrasi Australia yaitu *Immigration Act* tahun 1958, yang mengatur mengenai masalah pemberian suaka atau status pengungsi (Wagiman, 2012). Namun, sebagaimana yang dikatakan Perdana Menteri Australia tahun 2013 yaitu Tony Abbot, terdapat kebijakan baru yang ketat yang telah diberlakukan sejak tanggal 18 September 2013 untuk mencegah para pengungsi dan pencari suaka masuk ke wilayah Australia melalui laut maupun darat.

Operation Sovereign Borders (OSB) adalah operasi perlindungan perbatasan yang bertujuan untuk menghentikan kedatangan pengungsi atau pencari suaka melalui jalur laut dan juga darat. Kebijakan tersebut diperkenalkan pada tahun 2013

di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbot. Adapun tujuan dari kebijakan ini meliputi, sebagai berikut:

1. Memulangkan *Illegal Maritime (IMA)* dengan mengembalikan kapal mereka ke negara asal
2. Tidak memberikan kesempatan para pengungsi dan pencari suaka untuk mendapatkan izin bermukim di Australia.
3. Mengerahkan kapal pencari suaka yang tidak layak berlayar dengan menggantinya dengan *orange lifeboats*.
4. Menolak untuk memproses status pengungsi (Asylum Seeker Resource Centre, 2013).

Kebijakan ini juga didukung dan dibantu oleh Organisasi Militer Australia sebagai upaya untuk menjaga keamanan Australia dari ancaman-ancaman yang akan datang (Ardianti, 2015). Kebijakan tersebut menuai kontroversi dan dikritik karena melanggar hukum internasional. Meskipun terdapat kritik, kebijakan ini efektif dalam mengurangi jumlah IMA yang tiba di Australia. Kebijakan ini diciptakan oleh Pemerintah Australia untuk memerangi penyelundupan manusia, mencegah migrasi ilegal ke Australia, dan mencegah orang melakukan perjalanan yang tidak aman dengan kapal penyelundup manusia.

Dalam konteks Operasi Perbatasan Berdaulat atau *Operation Sovereign Borders* (OSB) di Australia, ini adalah operasi keamanan perbatasan yang dipimpin militer yang bertujuan untuk menghentikan kedatangan pengungsi atau pencari suaka melalui laut maupun darat, yang dilakukan untuk memerangi penyelundupan

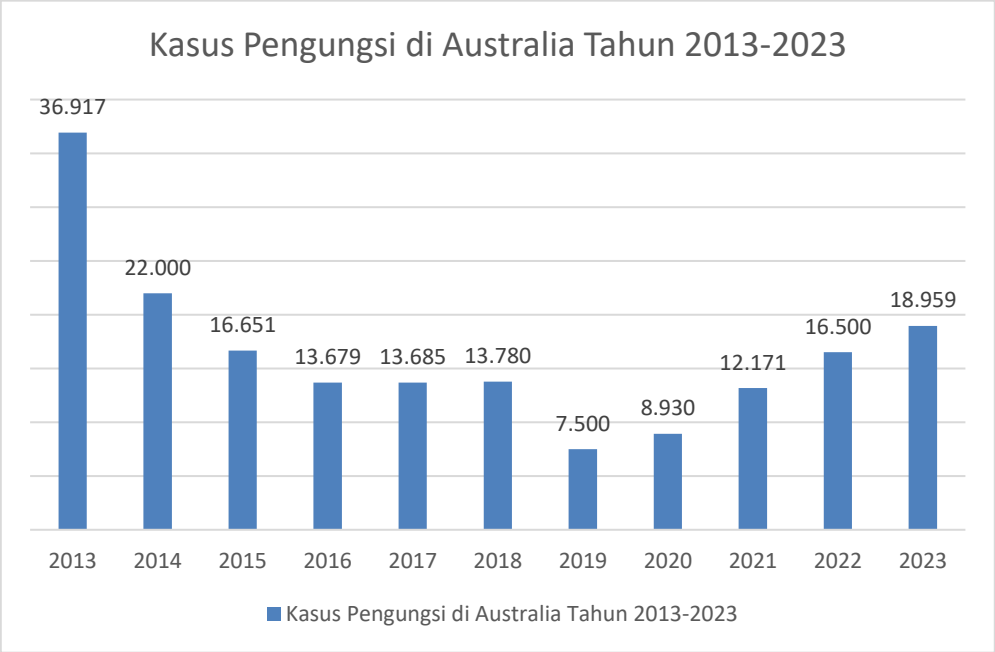
manusia, mencegah migrasi ilegal ke Australia, dan mencegah orang melakukan perjalanan yang tidak aman (Elisabeth, 2016). Selain itu juga efektif dalam mengurangi kedatangan pegungsi dan pencari suaka melalui laut dan darat, namun juga menjadi subjek kontroversi dan kritik mengenai dampaknya terhadap kewajiban Australia berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.

Walaupun kebijakan ini banyak dikritik oleh berbagai badan hak asasi manusia domestik dan internasional, PBB, pemerintah asing, LSM, dan kelompok medis. Pemerintah menyebut bahwa permasalahan mengenai penyeludupan manusia yang dilakukan oleh para imigran gelap ini adalah suatu krisis darurat nasional (Achmad, 2003). Kebijakan Australia ini menimbulkan pertentangan dampak signifikan terhadap para imigran gelap yang diseludupkan, serta pelanggaran terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 bagi negara Australia. Kebijakan ini juga banyak menuai kontroversi karena adanya pelanggaran prinsip *Non-Refoulement* yaitu dengan memulangkan pengungsi atau pencari suaka ke daerah asal.

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 pada dasarnya memiliki prinsip yang hampir sama, terdapat 3 hal pokok yang menjadi isi dari konvensi tersebut, yang pertama yaitu pengertian dasar mengenai pengungsi yang bertugas menanggulangi permasalahan pengungsi dan merupakan bagian dari PBB. Isi yang kedua mengemukakan mengenai status hukum pengungsi, yang menyangkut mengenai hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian. Isi yang ketiga memuat tentang implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama dalam administrasi dan hubungan diplomatik (Muhammad, 2020). Faktanya, justru

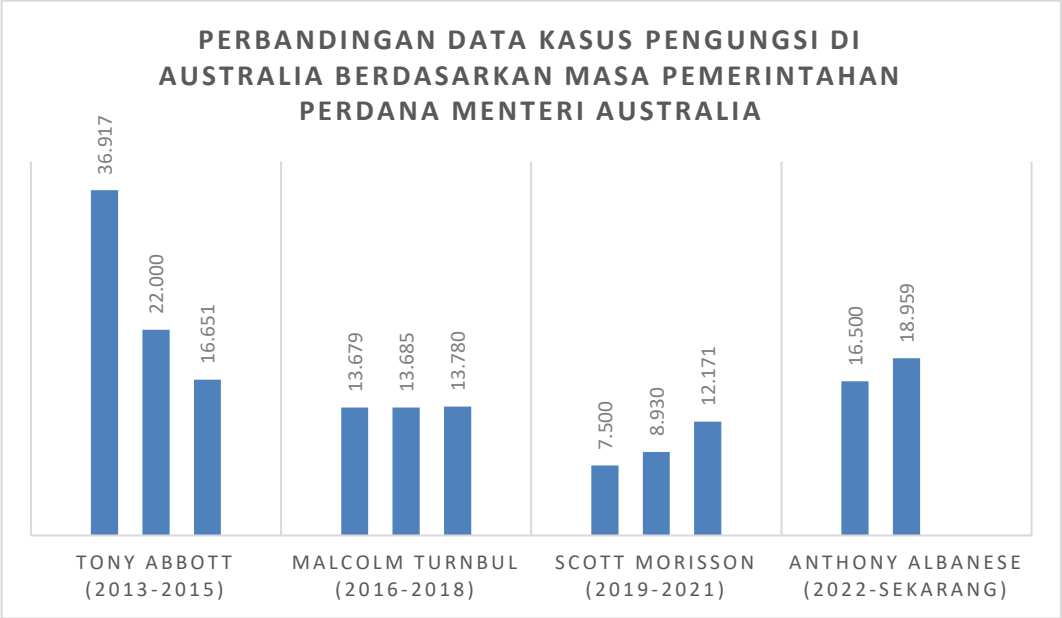
kebijakan *Operation Sovereign Borders* bertolak belakang dengan isi dari Konvensi Pengungsi 1951. Padahal dalam Konvensi Pengungsi 1951 menyatakan bahwa pengungsi dan pencari suaka bisa memasuki atau mendiami suatu negara secara tidak sah asalkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan status sebagai pengungsi secara resmi. Sebagai salah satu negara penandatangan Konvensi 1951, seharusnya pemerintah Australia tidak menolak para pencari suaka atau pengungsi dan memberikan perlindungan yang lebih layak.

Grafik 1.1 : Kenaikan kasus gelombang pengungsi di Australia



Sumber: Olahan peneliti berdasarkan data dari UNHCR *The UN Refugee Agency of Australia*, Tahun 2024

Grafik 1.2 : Data kasus pengungsi di Australia berdasarkan Masa Perintahan Perdana Menteri Australia



Sumber: Olahan peneliti berdasarkan data dari UNHCR *The UN Refugee Agency of Australia,* Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, tercatat bahwa arus gelombang pengungsi yang memasuki wilayah Australia meningkat dengan sangat signifikan per-tahunnya. Peningkatan kasus pengungsi ini terutama disebabkan karena adanya faktor bencana alam dan juga konflik. Hal ini mengakibatkan banyaknya orang/jiwa yang bermigrasi ke Australia untuk mencari tempat tinggal dan tempat perlindungan yang lebih baik agar terhindar dari konflik yang terjadi.

Pada tahun 2013 dibawah kepemimpinan Mantan Perdana Menteri Australia yaitu Tony Abbot, terdata bahwa Australia telah menerima lebih dari 35.000 jiwa pengungsi yang hampir rata-ratanya berasal dari Irak dan Suriah. Dengan

ditetapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders*, tingginya angka kasus pengungsi yang masuk justru perlahan menurun karena adanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tony Abbott. Seiring dengan adanya pergantian masa kepemimpinan, pada tahun 2017 hingga 2018 adanya penurunan angka kasus pengungsi yaitu menjadi 13.750 jiwa pengungsi yang memasuki wilayah Australia. Dan pada tahun 2019 jumlah angka pengungsi menurun dengan sangat signifikan yaitu menjadi 7.500 jiwa (Kendall, 2021).

Paul Power, selaku Direktur Eksekusif Dewan pengungsi Australia (RCOA) mengatakan bahwa tepatnya di akhir tahun 2022 hingga tahun 2023 telah tercatat sebanyak 18.959 jiwa pengungsi yang memasuki Australia. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari konflik di Ukraina dan situasi di Afghanistan. dengan bertambahnya jumlah pengungsi tersebut, diperkirakan bahwa Australia dengan mudahnya menerima pengungsi bisa mencapai 20.000 jiwa sampai tahun 2025-2026 (Hirst, 2024). Jika dilihat dari grafik, tentu saja ada pemicu yang menjadi alasan kenapa arus gelombang pengungsi terus bertambah.

Dibalik terjadinya perbedaan pelaksanaan kebijakan *Operation Sovereign Borders*, pengaruh dari latar belakang keturuna dari Anthony Albanese juga menjadi salah satu penyebabnya. Albanese lahir pada 2 Maret 1963 di Sydney dari seorang ibu tunggal bernama Maryanne Ellery, seorang pensiunan pemerintah yang mengalami disabilitas. Ayahnya bernama Carlo Albanese, seorang imigran Italia yang bertemu ibunya di kapal pesiar pada 1962. Anthony Albanese adalah sosok perdana menteri Australia yang mewakili keragaman Australia sebagai pemimpin dengan "nama *non-Anglo Celtic*" (CNN Indonesia, 2022). *Non-Anglo-Celtic*,

mencakup individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang etnis seperti imigran dari Asia atau Eropa Selatan yang berkontribusi pada keragaman budaya negara tersebut.

Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, membuka kuota pengungsi sebagai respons terhadap kekurangan tenaga kerja dan kebutuhan akan imigrasi yang lebih inklusif. Kebijakan ini tidak secara langsung terkait dengan latar belakang etnisnya, meskipun ia memiliki keturunan Aborigin. Albanese menekankan pentingnya migrasi dalam sejarah Australia dan berusaha menciptakan peluang bagi semua orang, terlepas dari asal-usul mereka. Motivasi utama Anthony Albanese dalam membuka kuota pengungsi di Australia adalah untuk mengatasi krisis tenaga kerja yang mendesak. Dengan tingkat pengangguran yang rendah dan kebutuhan akan pekerja terampil, Albanese berusaha menarik lebih banyak imigran untuk berkontribusi pada ekonomi Australia (Esthi & Rizky, 2022). Ia menekankan bahwa migrasi merupakan bagian integral dari identitas Australia dan penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbot pada tahun 2013 telah berubah, dengan fokus utamanya untuk mengurangi jumlah pengungsi, saat ini dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese justru berubah menambah kapasitas pengungsi di wilayah Australia. Selain itu, dengan adanya pergantian masa kepemimpinan juga menjadi faktor alasan pengungsi memilih Australia sebagai negara tujuan untuk mendapatkan perlindungan. Pada tahun 2013 dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Australia

yaitu Tony Abbot, kebijakan *Operation Sovereign Borders* diberlakukan dengan ketat sebagai upaya untuk menghentikan kapal-kapal yang membawa masuk pengungsi ke Australia. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga dinilai tidak manusiawi karena melanggar Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (Elisabeth, 2016). Sedangkan pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Australia saat ini yaitu Anthony Albanese, kebijakan *Operation Sovereign Borders* dikembangkan dengan pendekatan yang berfokus pada integritas sistem imigrasi dan perlindungan perbatasan yang lebih efektif. Namun pada kenyataannya, pengembangan kebijakan ini menuai kontroversi oleh warga negaranya sendiri karena telah membuka kuota dan membebaskan para pengungsi untuk memasuki Australia.

Ketika Anthony Albanese dan Partai Buruh *(Labor Party)* memenangkan pemilihan umum pada tahun 2022, banyak pihak yang bertanya-tanya apakah kebijakan *Operation Sovereign Borders* akan dipertahankan atau diubah secara signifikan. Namun, pemerintahan Albanese secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan *Operation Sovereign Borders*. Perdana Menteri Albanese dan pemerintahannya menyadari bahwa meskipun kebijakan ini kontroversial, kebijakan ini telah berhasil secara efektif menghentikan kapal-kapal pengungsi dan pencari suaka yang tidak sah dan mencegah hilangnya nyawa di laut. Mereka berpendapat bahwa konsistensi dalam kebijakan perbatasan sangat penting untuk mencegah penyelundup manusia kembali beroperasi (Susanna, 2020). Oleh karena itu, misi utama dari kebijakan *Operation Sovereign Borders* yaitu untuk melindungi perbatasan Australia, memerangi penyelundupan manusia, dan mencegah hilangnya nyawa di laut, tetap menjadi prioritas di bawah pemerintahan Albanese.

Meskipun pemerintahan Albanese mempertahankan kerangka dasar *Operation Sovereign Borders*, terdapat indikasi dan harapan bahwa pendekatannya akan lebih "humanis" dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, terutama dalam aspek penanganan individu yang sudah berada dalam sistem atau yang berhasil mencapai Australia. Berdasarkan dari website pada laman Government Australia (2022), beberapa alasan dan indikasi pendekatan humanis ini adalah:

1) *Penghapusan Temporary Protection Visas* (TPVs): Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh pemerintahan Albanese adalah menghapus *Temporary Protection Visas* (visa perlindungan sementara) dan memberikan jalur menuju visa permanen bagi ribuan pengungsi yang telah berada di Australia selama bertahun-tahun dalam ketidakpastian hukum. TPVs sebelumnya diterapkan oleh pemerintahan Koalisi untuk memastikan bahwa pengungsi yang tiba secara tidak sah tidak akan pernah mendapatkan tempat tinggal permanen di Australia, sehingga menciptakan "limbo" yang berkepanjangan. Penghapusan TPVs ini dianggap sebagai langkah humanis untuk memberikan kepastian dan stabilitas bagi para pengungsi.
2) Perbaikan dalam Proses Peninjauan Klaim Suaka: Pemerintahan Albanese juga berupaya untuk membuat proses peninjauan klaim suaka lebih adil dan efisien. Meskipun detailnya masih berkembang, tujuan utamanya adalah mengurangi birokrasi dan memastikan bahwa kasus-kasus ditangani dengan mempertimbangkan kerentanan pemohon.
3) Fokus pada *Resettlement* dan Kerjasama Regional: Pemerintah Albanese menunjukkan keinginan untuk memperdalam kerja sama regional dalam

perlindungan pengungsi, termasuk dengan negara-negara seperti Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi bagi pengungsi di negara-negara transit dan memastikan mereka memiliki akses ke kebutuhan dasar, sehingga mengurangi desakan untuk melakukan perjalanan berbahaya ke Australia. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada solusi jangka panjang yang melibatkan tanggung jawab bersama di tingkat regional.

4) Narasi "Kebaikan Bukan Kelemahan": Anthony Albanese seringkali menyatakan bahwa "kebaikan bukanlah kelemahan" dan berkomitmen untuk memastikan "tidak ada yang tertinggal." Meskipun ini adalah pernyataan umum, dalam konteks kebijakan pengungsi, hal ini mengindikasikan keinginan untuk menjauh dari retorika yang demonisasi pengungsi dan beralih ke pendekatan yang lebih berbasis martabat dan kasih sayang, terutama bagi mereka yang sudah berada di Australia.

Dari penjelasan latar belakang diatas, terlepas dengan pergantian kepemimpinan maka penerapan kebijakan yang sudah ditetapkan juga mengalami perbedaan. Penerapan dari Kebijakan Australia yaitu *Operation Sovereign Borders* ini mengalami kelonggaran pada masa pemerintahan Anthony Albanese. Kelonggaran ini terjadi didasarkan pada pendekatan Perdana Menteri Australia yaitu Anthony Albanese yang berfokus pada integritas sistem imigrasi dan perlindungan perbatasan yang lebih efektif yang dianggap lebih manusiawi dan berorientasi pada solusi yang lebih permanen untuk pengungsi. Oleh karena itu,

melalui penulisan proposal penelitian ini penulis ingin membahas mengenai Kebijakan Australia *Operation Sovereign Borders* Dalam Menanggulangi Pengungsi Pada Masa Pemerintahan Anthony Albanese.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Naiknya tingkat gelombang pengungsi (*refugees)* di Australia pada tahun 2023.
2. Terjadinya kecaman pada warga negara Australia terhadap kelonggaran kebijakan *Operation Sovereign Borders* yang dilakukan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese.

1.3. Fokus Penelitian

Kebijakan *Operation Sovereign Borders* yang diberlakukan Australia adalah bentuk dari kepentingan pertahanan kedaulatan negaranya. Disisi lain kebijakan *Operation Sovereign Borders* melanggar Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang perlindungan terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Agar penelitian tidak meluas maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada satu fokus utama yaitu teknis pelaksanaan kebijakan Australia *Operation Sovereign Borders* pada masa Pemerintahan Anthony Albanese dalam mengatasi pengungsi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah penelitianyang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang "Mengapa Pelaksanaan Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia menjadi terbuka terhadap pengungsi pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese?"

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengembangan kebijakan Australia *Operation Sovereign Borders* pada masa Pemerintahan Anthony Albanese dalam mengatasi pengungsi. Selain itu, penulis juga menjelaskan apa yang menjadi alasan Anthony Albanese melaksanakan kebijakan *Operation Sovereign Borders* dengan membuka kuota pengungsi di Australia untuk mengatasi krisis tenaga kerja yang mendesak agar efektif dalam mengatasi masalah pengungsi.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi studi hubungan internasional sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan penelitian mengenai kebijakan *Operation Sovereign Borders* dalam mengatasi pengungsi *(refugees)* di Australia pada tahun 2023.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak diantarannya :

a) Dapat menjadi suatu bentuk perspektif bagi pembaca mengenai kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh Australia untuk menjaga kedaulatan negarannya dari ancaman masuknya gelombang pengungsi yang besar.
b) Penelitian ini berguna dalam memberikan saran kepada pemerintah dan pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk tidak hanya berpegang teguh pada kedaulatan negara sendiri ataupun adanya unsur kepentingan individu. Akan tetapi juga perlu untuk mempertimbangkan keterlibatan dari aktor-aktor lain seperti para pengungsi, UNHCR, negara transit dan warga negara.